

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR SKEMA	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Tipe Penelitian	10
1.5.2 Pendekatan Masalah	10
1.5.3 Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	15
1.5.6 Sistematika Penulisan	17
BAB II	
KARAKTERISTIK IZIN LINGKUNGAN DAN PERSETUJUAN	
LINGKUNGAN.....	20
2.1 Sistem Perizinan Lingkungan di Indonesia	20
2.1.1 Pengertian Izin Lingkungan.....	21
2.1.2 Fungsi Izin Lingkungan	25
2.1.3 Tujuan Izin Lingkungan.....	28
2.2 Persetujuan Lingkungan	29
2.2.1 Pengertian Persetujuan Lingkungan	29
2.2.2 Pengaturan Izin Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11	
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	37

2.2.3 Politik Hukum Perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	47
2.2.4 Persamaan dan Perbedaan Izin Lingkungan dengan Persetujuan Lingkungan	65
BAB III	
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN DI BIDANG LINGKUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	
3.1 Kedudukan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha.....	86
3.1.1 Perizinan Berusaha	86
3.1.2 Persetujuan Lingkungan Sebagai Persyaratan Dasar untuk Memperoleh Perizinan Berusaha.....	90
3.2 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan.....	92
3.2.1 Penegakan Hukum	92
3.2.2 Sanksi Administratif	93
3.2.3 Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan	98
3.2.3.1 Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 jo PP No. 27 Tahun 2012 dan PERMEN LHK No. 2 Tahun 2013	98
3.2.3.2 Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 jo PP No. 22 Tahun 2021	104
BAB IV	
PENUTUP.....	130
4.1 Kesimpulan	130
4.2 Saran	130
DAFTAR BACAAN	132

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256).

DAFTAR SKEMA

Nomor	Judul Skema	Halaman
Skema 2.1	Tahap penerbitan izin lingkungan	82
Skema 2.2	Tahap penerbitan persetujuan lingkungan.....	83

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Perubahan pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2009 dalam UU No. 11 Tahun 2020 terkait izin lingkungan	39
Tabel 2.2	Perbandingan perubahan Pasal 1 angka 35 UU No. 32 Tahun 2009	51
Tabel 2.3	Alasan perubahan pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2009 dalam UU No. 11 Tahun 2020	53
Tabel 2.4	Proses penerbitan persetujuan lingkungan.....	73
Tabel 3.1	Perbandingan Pasal 76 sebelum dan setelah diubah	104
Tabel 3.2	Denda administratif dalam PP No. 22 Tahun 2021	107
Tabel 3.3	Perbandingan sanksi administratif dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan peraturan turunannya dengan sanksi administratif dalam UU No. 11 Tahun 2020 dan peraturan turunannya	115